

Daftar Pustaka

A. Buku

- Asikin, Zainal, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi ed. 2*, Sinar Grafika, Jakarta
- Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian (Cetakan VI)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Cruz, Peter De 2010, *Perbandingan Sistem Hukum : Civil Law, Common Law, dan Socialist Law*, Terj: Narulita Yusron, Diadit Media, Jakarta
- Friedman, Lawrence, 1976, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Hamzah, Moh. Amir, 2013, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang.
- Harahap, Yahya, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No 7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta
- Kelsen, Hans, 1991, *General Theory of Norm*, Clarendon Press, Oxford
- Lubis, Sulaikan, *et.al*, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta
- 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pompe, Sebastian 2012, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta.

Pound, Roscoe, 1978, *An Introduction to The Philosophy of Law*, Yale University Press, Michigan

Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung

Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta

B. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Pasaribu, Bonar Cornelius, 2011, *Penerapan prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Dalam Kerangka Negara Hukum Indonesia*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Rouf, Uuf, 2014, *Peran Teknologi Informasi Pada Manajemen Administrasi Perkara di Pengadilan Agama (Studi Kasus Implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Shalihah, Septiana Anifatus, 2018, *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Wibowo, Basuki Rekso, 2012, *Pembenahan Administrasi Peradilan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional*, BPHN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta

C. Makalah/Pidato

Allsop, James, "Technology and the Future of the Courts", Special Lecture Series on Technology and the Future of Legal Profession, TC Beirne School of Law, University of Queensland, 2019

Prasetyo, Banu dan Umi Trisanty, "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial", disampaikan dalam Lokakarya "Prosiding Semateksos : Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0" Institut Teknologi 10 Nopember, Surabaya, , 2018

Zuanita, dan Zetria Erma, "Peranan Hukum dalam Pembangunan Industri Nasional Pada Era Revolusi Industri 4.0", Jurnal Seminar Nasional Era Industri 4.0

D. Artikel Majalah/Koran

Irianto, Sulistyowati, "Tantangan Pendidikan Tinggi Hukum di Era 4.0", Kolom Opini Harian Kompas terbit 4 Maret 2019.

Satya, Venti Eka, "Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0", Majalah Info Singkat Vol. X, No. 09/I/Puslit, Mei/2018.

E. Internet

Fadjar, Anthony, "MA keluaran Perma Administrasi Perkara Secara Elektronik", <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/315894-MA-Keluarkan-Perma-Administrasi-Perkara-Secara-Elektronik>, diakses 4 Maret 2018

JRTO, "Mahkamah Agung RI Meresmikan Aplikasi E-Court", <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/2614-mahkamah-agung-ri-meresmikan-aplikasi-e-court.html>, diakses 15 Juli 2019 pukul 07:44

Tanpa nama, "Strategi Penerapan Electronic Court File", <https://www.pn-blitar.go.id/berita-terbaru/1160-strategi-fca-menerapkan-ecf>, diakses pukul 23:10 tanggal 7 Juli 2019

Tanpa nama, "#Envision2030 Goal 16: Peace, Justice, Strong Institution", <https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal16.html>, diakses 26 Februari 2018, pukul 10:47

Tanpa nama, "Prosedur Pembayaran Panjar Biaya Melalui Bank", http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=107%3Aprosedur-pembayaran-panjar-biaya-melalui-

[bank&catid=25%3Alaporan-keuangan&Itemid=262&lang=id](#), diakses 18 April 2019 pukul 16.00

Tanpa nama, “Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, <http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/content/berita/2018080117413010531483115b618e5a7bb20.html>”, diakses 26 Februari 2019 pukul 11:21

Thompson, Angus, “Court Fights Go Online in NSW trial”, <https://www.smh.com.au/national/nsw/court-fights-go-online-in-nsw-trial-20180611-p4zku4.html>, New South Wales, diakses 1 Maret 2018 pukul 13.24

Yasin, Muhamad, “Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SK MA)”, Kolom Klinik Hukumonline, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-\(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma\)](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma)), diakses 6 Maret 2018 pukul 17:48

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Het Herzine Indlandsch Reglement (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: *Staatblad 1848 no. 16, S1941 no 44*);

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Undang Undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum dan terakhir dengan UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Federal Court Rules of Australia;

Technology and Court Practice Note (GPN-TECH) of Australia;

Central Practice Note-2 of Australia.

G. Putusan Pengadilan

Putusan Akhir, Pengadilan Negeri Semarang, 341/PDT.G/PN.SMG/2018, Perihal Gugatan yang diajukan PT Randugarut Palstic Indonesia melawan Ir. Edhie Sukianto Tejopurnomo, 28 Januari 2019